



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA

Menimbang : a bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;

b bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri di Kota Samarinda mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian yang dapat mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan;

c bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Samarinda
- 2 Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda
- 3 Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda
- 4 Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan hortikultura peternakan perikanan dan perkebunan

- 5 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah
- 6 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang
- 7 Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan mengembangkan memanfaatkan dan membina mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan
- 8 Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara
- 9 Kawasan adalah wilayah yang fungsi utama lindung atau budidaya
- 10 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama mendukung kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional
- 11 Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi modal tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat
- 12 Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B
- 13 Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia
- 14 Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda
- 15 Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan atas :

- a manfaat;
- b keberlanjutan dan konsisten;
- c keterpaduan;
- d keterbukaan dan akuntabilitas;
- e kebersamaan dan gotong royong;
- f partisipatif;
- g keadilan
- h keserasian keselarasan dan keseimbangan;
- i kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j desentralisasi;
- k tanggung jawab;
- l keragaman; dan
- m sosial dan budaya

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Perlindungan LP2B melalui pengendalian alih fungsi LP2B di Daerah

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c mewujudkan kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i mewujudkan revitalisasi pertanian

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 5

Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan :

- a Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b LP2B di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

### Pasal 6

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Pertanian di Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi
- (3) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana detail tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan :
  - a LP2B seluas 1230 880 Ha (seribu dua ratus tiga puluh koma delapan delapan hektar); dan
  - b Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada dalam kawasan budi daya pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
- (2) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

- (3) Luas sebaran LP2B dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kecamatan dan kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB III**  
**ALIH FUNGSI LP2B**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a
- (2) LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan dan mengacu pada ketentuan umum zonasi Rencana Tata Ruang Wiayah untuk kawasan pertanian
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka :
- a pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b terjadi bencana
- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan Lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi :
- a pengembangan jalan umum;
  - b waduk;
  - c bendungan;
  - d irigasi;
  - e saluran air minum atau air bersih;
  - f drainase dan sanitasi;
  - g bangunan pengairan;
  - h pelabuhan;
  - i bandar udara;
  - j stasiun dan jalan kereta api;
  - k terminal;
  - l fasilitas keselamatan umum;
  - m cagar alam; dan/atau
  - n pembangkit dan jaringan listrik
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan lahan hak milik perorangan non pertanian yang dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- (3) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti LP2B yang akan dialihfungsikan
- (4) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan

### Pasal 10

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1) Dalam hal terjadi alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :

- a pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 11

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan budi daya pertanian dengan :

- a luasan lahan yang sama;
- b kriteria kesesuaian lahan; dan
- c dalam kondisi siap tanam

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 12

- (1) Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat :
  - a dilakukan kajian kelayakan strategis;
  - b disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan dengan ketentuan :
  - a paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
  - b paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
  - c paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan rencana program jangka menengah maupun rencana program jangka panjang perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanian pada saat alih fungsi direncanakan

### Pasal 13

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup :

- a luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
- b potensi kehilangan hasil;
- c resiko kerugian investasi; dan
- d dampak ekonomi lingkungan sosial dan budaya

#### Pasal 14

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup :

- a luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
- b jadwal alih fungsi;
- c luas dan lokasi lahan pengganti;
- d jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e pemanfaatan lahan pengganti

#### Pasal 15

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan penetapan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 16

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
  - a Pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B

#### Pasal 17

Dalam menentukan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan harus mempertimbangkan :

- a luasan hamparan lahan;
- b tingkat produktivitas lahan; dan
- c kondisi infrastruktur dasar

#### Pasal 18

Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti

Bagian Ketiga  
Tata Cara  
Pasal 19

- (1) Pengalihfungsian yang dilakukan terhadap LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Wali Kota
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri

Pasal 20

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Wali Kota setelah dilakukan verifikasi
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Wali Kota
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kementerian/lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pertanahan dan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang :
  - a pertanian;
  - b perencanaan pembangunan daerah;
  - c penataan ruang; dan
  - d pembangunan infrastruktur;
  - e perekonomian

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 22

LP2B yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti LP2B selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bagian Keempat  
Ganti Rugi  
Pasal 23

Pengalihfungsian LP2B milik masyarakat wajib diberikan ganti rugi

Pasal 24

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B
- (2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sama dengan yang berlaku pada saat itu
- (3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur LP2B
- (4) Nilai investasi insfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk tanam tumbuh
- (5) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dilokasi lahan pengganti

- (6) Dalam hal alih fungsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (7) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada :
  - a taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialih fungsikan;
  - b taksiran nilai tanam tumbuh berdasarkan harga pasar yang berlaku; dan
  - c taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti;
- (8) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi sebagaimana Pasal 20

Bagian Kelima

Perizinan

Pasal 25

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LP2B batal demi hukum kecuali untuk kepentingan umum dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B sesuai keadaan semula
- (3) Setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut

Bagian Keenam

Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a peringatan tertulis;
  - b penghentian sementara kegiatan;
  - c penghentian sementara pelayanan umum;
  - d penutupan lokasi;
  - e pencabutan izin;
  - f pembatalan izin;
  - g pembongkaran bangunan;
  - h pemulihan fungsi lahan;
  - i pencabutan insentif; dan/atau
  - j denda administratif

## BAB IV

### PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani kelompok petani koperasi petani serta asosiasi petani

#### Pasal 28

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa pemberian jaminan:
  - a membantu pengendalian harga pangan pokok petani ;
  - b memprioritaskan bantuan sarana produksi dan prasarana pertanian;
  - c pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  - d pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;dan/atau
  - e ganti rugi akibat gagal panen melalui asuransi pertanian
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

#### Pasal 29

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a penguatan kelembagaan petani;
- b penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Wali Kota

## BAB V

### SISTEM INFORMASI

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi
- (3) Sistem informasi LP2B sekurang - kurangnya memuat data lahan tentang:
  - a Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b LP2B;
  - c Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - d tanah telantar dan subyek haknya
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :

- a fisik alamiah;
  - b fisik buatan;
  - c kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e luas dan lokasi lahan; dan
  - f jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok
- (5) Wali Kota wajib menyampaikan informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Wali Kota

#### Pasal 32

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan sampai kecamatan dan kelurahan termasuk desa dan masyarakat umum

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Wali Kota

### BAB VI LARANGAN

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi

### BAB VII PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 35

- (1) Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanian melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan LP2B
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a koordinasi perlindungan;
  - b sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi;
  - d pendidikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - e penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
  - f peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian :
  - a insentif;
  - b disinsentif;
  - c mekanisme perizinan;
  - d proteksi; dan

- e penyuluhan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 36

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
  - b melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f memanggil orang untuk didengar dan diperiksa seagai tersangka atau saksi;
  - g mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya; dan
  - i mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 37

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Pasal 23 Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 34 dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan LP2B dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 02 November 2021  
WALI KOTA SAMARINDA

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 02 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum

  
EKO SUPRAYETNO S Sos  
NIP 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: 64 72/I/44/6/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I UMUM

Tujuan bernegara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial” Oleh karena itu perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara baik pemerintah pemerintahan provinsi maupun pemerintah kota Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan mewujudkan kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak mempertahankan keseimbangan ekologis serta mewujudkan revitalisasi pertanian

Alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan keamanan pangan dan kedaulatan pangan Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman merata daan terjangkau Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan dan membahayakan kesehatan manusia Sedangkan kedaulatan pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi LP2B ini diharapkan

dapat mempertahankan keamanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kota Samarinda serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke lahan bukan pertanian yang justru tidak produktif

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi kini maupun generasi masa depan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan LP2B yang fungsi pemanfaatan dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah pemerintah daerah pemilik lahan petani kelompok tani dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembiayaan dan pengawasan Huruf g Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian keselarasan dan keseimbangan” adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keserasian keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat lingkungan dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok misalnya padi jagung sagu dan ubi kayu

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual menyegarkan kembali vitalitas memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain Strategi yang ditempuh melalui:

- 1 pengurangan kemiskinan keguremen dan pengangguran;
- 2 peningkatan daya saing produktivitas dan produksi pertanian; dan
- 3 pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Alih fungsi lahan LP2B dalam rangka pemanfaatan ruang juga memperhatikan ketentuan umum zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kawasan Tanaman Pangan LP2B yaitu :

- 1 Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya serta pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian
- 2 Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat telah memiliki sertifikat kepemilikan bukan pertanian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan tanaman pangan antara lain kegiatan pemukiman petani dengan kepadatan rendah kegiatan industri tanaman pangan dan fasilitas penunjangnya kegiatan pariwisata kegiatan penelitian dan kegiatan untuk kepentingan umum

- 3 Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung fungsi kawasan pertanian tanaman pangan serta kegiatan penggunaan yang dapat memicu terjadinya peengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada anga 1 dan2
- 4 Penerapan intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
  - a KDB maksimum 20 % (dua puluh persen);
  - b KLB maksimum 0 8 (nol koma delapan);
  - c Tinggi bangunan maksimum (empat) lantai dengan memperhatikan ketentuan dalam KKOP yang telah ditetapkan;
  - d KDH minimum 80% (delapan puluh persen) termasuk kawasan tanaman pangan

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Pengalihfungsian LP2B untuk kepentingan umum dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan oleh pihak yang mengalihfungsikan pada kawasan yang masih termasuk dalam pola ruang kawasan pertanian

Rencana LP2B berisi kebijakan strategi indikasi program serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan LP2B merupakan muatan dari rencana pembangunan jangka panjang rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan perangkat daerah Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Tanah telantar sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) huruf b adalah tanah yang diberikan hak oleh negara berupa hak milik hak guna usaha hak guna bangunan hak pakai hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemnerian hak atau dasar pengunannya

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Rekomendasi dari Menteri dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini adalah Menteri Pertanian

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ayat (5) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Pasal 33

Peraturan Wali Kota dimaksudkan untuk mengatur lebih rinci petunjuk teknis penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B :

- a penyediaan data dasar LP2B;
- b distribusi produk Sistem Informasi LP2B;
- c pemuktahiran penyediaan data dasar LP2B;
- d pengendalian dan evaluasi hamparan/tutupan LP2B;
- e pengendalian dan evaluasi kepemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 9

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN**  
**PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**LUASAN LAHAN SAWAH LP2B KOTA SAMARINDA**

NO	POLA RUANG	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS LAHAN (HA)
1	Kawasan Pertanian	Sungai Kunjang		0.017994
2	Kawasan Pertanian	Sungai Kunjang		1.148821
<b>LUAS LAHAN KECAMATAN SUNGAI KUNJANG</b>				<b>1.167</b>
3	Kawasan Pertanian	Sungai Pinang		0.07021
4	Kawasan Pertanian	Sungai Pinang		0.029959
5	Kawasan Pertanian	Sungai Pinang		0.035869
6	Kawasan Pertanian	Sungai Pinang		0.022971
7	Kawasan Pertanian	Sungai Pinang		4.3085
8	Kawasan Pertanian	Sungai Pinang		2.529253
9	Kawasan Pertanian	Sungai Pinang		2.171022
<b>LUAS LAHAN KECAMATAN SUNGAI PINANG</b>				<b>9.168</b>
10	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.081105
11	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.019806
12	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.019925
13	Kawasan Pertanian	Sambutan		1.477488
14	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.141902
15	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.129319
16	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.098415
17	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.067995
18	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.116539
19	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.065909
20	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.182096
21	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.313759
22	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.247383
23	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.992617
24	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.047761
25	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.004937
26	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.060686
27	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.456398
28	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.342896
29	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.298848
30	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.337735
31	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.060714
32	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.410301
33	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.444525
34	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.308365
35	Kawasan Pertanian	Sambutan		2.052567
36	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.093472
37	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.059341
38	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.49362
39	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.023889
40	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.052973
41	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.047033
42	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.023825
43	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.161996
44	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.969125

45	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.022869
46	Kawasan Pertanian	Sambutan		1.834957
47	Kawasan Pertanian	Sambutan		1.205384
48	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.322476
49	Kawasan Pertanian	Sambutan		8.478562
50	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.562274
51	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.431761
52	Kawasan Pertanian	Sambutan		1.47869
53	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.000099
54	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.000009
55	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.037294
56	Kawasan Pertanian	Sambutan		13.713837
57	Kawasan Pertanian	Sambutan		11.981869
58	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.058186
59	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.017196
60	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.159243
61	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.302835
62	Kawasan Pertanian	Sambutan		52.924793
63	Kawasan Pertanian	Sambutan		54.15676
64	Kawasan Pertanian	Sambutan		20.520882
65	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.948569
66	Kawasan Pertanian	Sambutan		3.927099
67	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.216857
68	Kawasan Pertanian	Sambutan		5.274805
69	Kawasan Pertanian	Sambutan		9.150664
70	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.41187
71	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.377462
72	Kawasan Pertanian	Sambutan		1.175401
73	Kawasan Pertanian	Sambutan		5.829868
74	Kawasan Pertanian	Sambutan		1.857706
75	Kawasan Pertanian	Sambutan		1.785192
76	Kawasan Pertanian	Sambutan		3.891786
77	Kawasan Pertanian	Sambutan		4.1078
78	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.167844
79	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.212289
80	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.768704
81	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.611993
82	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.000021
83	Kawasan Pertanian	Sambutan		2.106932
84	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.059985
85	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.000553
86	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.21734
87	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.088804
88	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.102557
89	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.027049
90	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.000659
91	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.011631
92	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.031513
93	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.19563
94	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.003641
95	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.01072
96	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.000052
97	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.000044
98	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.001293

99	Kawasan Pertanian	Sambutan		0.075542
100	Kawasan Pertanian	Sambutan		2.63803
<b>LUAS LAHAN PERKECAMATAN SAMBUTAN</b>				<b>225.203</b>
101	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.15981
102	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.118728
103	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.175027
104	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.036365
105	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.037181
106	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.039932
107	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.059979
108	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.008667
109	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.027117
110	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.1214
111	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.039241
112	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.019953
113	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.045517
114	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000403
115	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.151205
116	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.929799
117	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.893282
118	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.045967
119	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000023
120	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.4993
121	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.226476
122	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.408607
123	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.004201
124	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.042688
125	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.37355
126	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.098622
127	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.088965
128	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001232
129	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.205125
130	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		10.934176
131	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		5.871953
132	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.160766
133	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.411915
134	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.359732
135	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.29181
136	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.063177
137	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.119136
138	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.587662
139	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.477663
140	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.23482
141	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		7.401074
142	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.256343
143	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.26043
144	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.262567
145	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		5.481823
146	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.590861
147	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		20.235478
148	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		16.447124
149	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		6.955872
150	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.526186
151	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.216627
152	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.482114
153	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.341139
154	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.219425
155	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.029371
156	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.147348
157	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000034
158	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		4.753814

159	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.263859
160	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.571453
161	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.72836
162	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.039398
163	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.616403
164	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		43.072019
165	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		8.636801
166	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		23.573951
167	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		5.691508
168	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		19.530244
169	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		13.26888
170	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.010229
171	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001574
172	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000536
173	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.005062
174	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.006014
175	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		22.871446
176	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		38.066986
177	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.817495
178	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.540745
179	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.388231
180	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		3.226438
181	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		17.268696
182	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.917962
183	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		8.561641
184	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.033439
185	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.020295
186	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.033104
187	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.022571
188	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000274
189	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.014289
190	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.009185
191	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.198327
192	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.117985
193	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.729099
194	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.050817
195	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.044514
196	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		3.038397
197	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000019
198	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.985836
199	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		6.870512
200	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.640035
201	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.612771
202	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.284994
203	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		6.199928
204	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		8.166093
205	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		19.861383
206	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.866562
207	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.622751
208	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.138607
209	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000011
210	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		3.189484
211	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.926752
212	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.902708
213	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		3.412914
214	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		4.605215
215	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.873752
216	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.044749
217	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.700349
218	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		3.025559
219	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.867139

220	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.902943
221	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		4.861383
222	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.317209
223	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		8.629138
224	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.815606
225	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.015092
226	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.005351
227	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.214983
228	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.127399
229	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.008637
230	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001399
231	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000068
232	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000028
233	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000302
234	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.005201
235	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.078148
236	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.16564
237	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.342505
238	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		13.677786
239	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.069118
240	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.440471
241	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.22188
242	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.211983
243	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.489129
244	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.108784
245	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.009846
246	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.670986
247	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.028545
248	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.370307
249	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.180461
250	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000501
251	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.118945
252	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.821801
253	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.012028
254	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.637521
255	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.849521
256	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.393135
257	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.00599
258	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.414774
259	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.072889
260	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.005393
261	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.288257
262	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.438444
263	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.385484
264	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.593133
265	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		3.417948
266	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.409756
267	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.178367
268	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.029795
269	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.279792
270	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000517
271	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.013985
272	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.013031
273	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.020168
274	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.129287
275	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.242874
276	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.527658
277	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.316209
278	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.847339
279	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.473392
280	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.007199

281	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		7.968655
282	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.28502
283	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.724067
284	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.015911
285	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.744138
286	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.284479
287	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.063527
288	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		3.435424
289	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.342749
290	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001909
291	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.887243
292	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.155419
293	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.447023
294	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.667974
295	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.314211
296	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.374581
297	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000641
298	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		4.696314
299	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.047892
300	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.031476
301	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.747645
302	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.369754
303	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.025662
304	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.038239
305	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.769548
306	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.102178
307	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.278439
308	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.012408
309	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.004281
310	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		3.027847
311	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.083082
312	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.675264
313	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.081116
314	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.070914
315	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001604
316	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.047954
317	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.059361
318	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.049605
319	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.262081
320	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.068918
321	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.137841
322	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.210645
323	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.084
324	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.065439
325	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		9.403724
326	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.26304
327	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.478336
328	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.043815
329	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.275534
330	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.316023
331	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.535836
332	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.510685
333	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.221723
334	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.06402
335	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.949845
336	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.396622
337	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.062179
338	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.094554
339	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.016151
340	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.020311
341	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000975

342	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.04271
343	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.136962
344	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.069793
345	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.118487
346	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.009307
347	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.011175
348	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.00372
349	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.059936
350	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		17.844324
351	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.051311
352	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.131623
353	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.738321
354	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.119924
355	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001458
356	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.003815
357	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.023823
358	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.015056
359	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.060021
360	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.558442
361	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		5.91122
362	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.926418
363	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.111897
364	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.816524
365	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0
366	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		4.662542
367	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.0581
368	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.035952
369	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001924
370	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.008879
371	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.017711
372	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.101476
373	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.017226
374	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.07863
375	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001122
376	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.024313
377	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.146025
378	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001887
379	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		6.892458
380	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.010017
381	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.004034
382	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.045142
383	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.056043
384	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.006038
385	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.032707
386	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.003999
387	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.037338
388	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.020683
389	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000489
390	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.003006
391	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.003264
392	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.044717
393	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.858637
394	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000699
395	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001409
396	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.880838
397	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.002667
398	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.066429
399	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.056123
400	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000126
401	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.001172
402	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.00479

403	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.496552
404	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.164853
405	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.300553
406	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.194102
407	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.042165
408	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.271419
409	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.002767
410	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.003492
411	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.003222
412	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.099783
413	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.222481
414	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.190177
415	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.045513
416	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		2.617665
417	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.00037
418	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.009173
419	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.014705
420	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.002745
421	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000049
422	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000021
423	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.005769
424	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000015
425	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000001
426	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000262
427	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000147
428	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.04066
429	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.000517
430	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.072724
431	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		1.092136
432	Kawasan Pertanian	Samarinda Utara		0.103407

**LUAS LAHAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

**558.049**

433	Kawasan Pertanian	Palaran		0.067263
434	Kawasan Pertanian	Palaran		0.10122
435	Kawasan Pertanian	Palaran		1.076694
436	Kawasan Pertanian	Palaran		0.035961
437	Kawasan Pertanian	Palaran		0.013484
438	Kawasan Pertanian	Palaran		0.014983
439	Kawasan Pertanian	Palaran		0.010865
440	Kawasan Pertanian	Palaran		0.392256
441	Kawasan Pertanian	Palaran		0.033708
442	Kawasan Pertanian	Palaran		0.03128
443	Kawasan Pertanian	Palaran		0.033083
444	Kawasan Pertanian	Palaran		0.026982
445	Kawasan Pertanian	Palaran		0.666151
446	Kawasan Pertanian	Palaran		0.109202
447	Kawasan Pertanian	Palaran		2.543055
448	Kawasan Pertanian	Palaran		0.10863
449	Kawasan Pertanian	Palaran		0.423529
450	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000313
451	Kawasan Pertanian	Palaran		0.02839
452	Kawasan Pertanian	Palaran		0.02984
453	Kawasan Pertanian	Palaran		0.010872
454	Kawasan Pertanian	Palaran		0.001732
455	Kawasan Pertanian	Palaran		0.0126
456	Kawasan Pertanian	Palaran		0.030368
457	Kawasan Pertanian	Palaran		0.025224
458	Kawasan Pertanian	Palaran		0.020548
459	Kawasan Pertanian	Palaran		0.124829
460	Kawasan Pertanian	Palaran		0.122762
461	Kawasan Pertanian	Palaran		0.103633
462	Kawasan Pertanian	Palaran		0.099959

463	Kawasan Pertanian	Palaran		0.051506
464	Kawasan Pertanian	Palaran		0.029696
465	Kawasan Pertanian	Palaran		0.011429
466	Kawasan Pertanian	Palaran		0.007068
467	Kawasan Pertanian	Palaran		0.002158
468	Kawasan Pertanian	Palaran		0.002696
469	Kawasan Pertanian	Palaran		0.0956
470	Kawasan Pertanian	Palaran		0.141453
471	Kawasan Pertanian	Palaran		0.053653
472	Kawasan Pertanian	Palaran		2.662845
473	Kawasan Pertanian	Palaran		0.445843
474	Kawasan Pertanian	Palaran		0.324289
475	Kawasan Pertanian	Palaran		0.003682
476	Kawasan Pertanian	Palaran		0.014597
477	Kawasan Pertanian	Palaran		1.197752
478	Kawasan Pertanian	Palaran		0.463067
479	Kawasan Pertanian	Palaran		0.014063
480	Kawasan Pertanian	Palaran		3.5726
481	Kawasan Pertanian	Palaran		3.648694
482	Kawasan Pertanian	Palaran		21.11416
483	Kawasan Pertanian	Palaran		1.006789
484	Kawasan Pertanian	Palaran		0.003546
485	Kawasan Pertanian	Palaran		0.043347
486	Kawasan Pertanian	Palaran		0.130345
487	Kawasan Pertanian	Palaran		2.296116
488	Kawasan Pertanian	Palaran		0.113387
489	Kawasan Pertanian	Palaran		0.092388
490	Kawasan Pertanian	Palaran		0.015322
491	Kawasan Pertanian	Palaran		0.106955
492	Kawasan Pertanian	Palaran		15.09083
493	Kawasan Pertanian	Palaran		4.641008
494	Kawasan Pertanian	Palaran		0.058999
495	Kawasan Pertanian	Palaran		0.111094
496	Kawasan Pertanian	Palaran		0.034898
497	Kawasan Pertanian	Palaran		4.666431
498	Kawasan Pertanian	Palaran		10.336206
499	Kawasan Pertanian	Palaran		0.422223
500	Kawasan Pertanian	Palaran		0.26453
501	Kawasan Pertanian	Palaran		2.84715
502	Kawasan Pertanian	Palaran		23.953092
503	Kawasan Pertanian	Palaran		5.097834
504	Kawasan Pertanian	Palaran		2.997803
505	Kawasan Pertanian	Palaran		3.527856
506	Kawasan Pertanian	Palaran		0.005299
507	Kawasan Pertanian	Palaran		0.591411
508	Kawasan Pertanian	Palaran		1.82598
509	Kawasan Pertanian	Palaran		2.349045
510	Kawasan Pertanian	Palaran		2.45218
511	Kawasan Pertanian	Palaran		1.155781
512	Kawasan Pertanian	Palaran		2.065657
513	Kawasan Pertanian	Palaran		6.40318
514	Kawasan Pertanian	Palaran		6.141061
515	Kawasan Pertanian	Palaran		2.497181
516	Kawasan Pertanian	Palaran		7.428226
517	Kawasan Pertanian	Palaran		0.002457
518	Kawasan Pertanian	Palaran		0.331311
519	Kawasan Pertanian	Palaran		0.302537
520	Kawasan Pertanian	Palaran		2.791206
521	Kawasan Pertanian	Palaran		0.041842
522	Kawasan Pertanian	Palaran		0.801081
523	Kawasan Pertanian	Palaran		0.47471

524	Kawasan Pertanian	Palaran		6.293568
525	Kawasan Pertanian	Palaran		0.775818
526	Kawasan Pertanian	Palaran		0.330517
527	Kawasan Pertanian	Palaran		0.043113
528	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000101
529	Kawasan Pertanian	Palaran		0.044096
530	Kawasan Pertanian	Palaran		0.163795
531	Kawasan Pertanian	Palaran		1.046425
532	Kawasan Pertanian	Palaran		0.819992
533	Kawasan Pertanian	Palaran		3.850129
534	Kawasan Pertanian	Palaran		0.57493
535	Kawasan Pertanian	Palaran		0.816698
536	Kawasan Pertanian	Palaran		0.46035
537	Kawasan Pertanian	Palaran		0.132986
538	Kawasan Pertanian	Palaran		1.9671
539	Kawasan Pertanian	Palaran		1.280418
540	Kawasan Pertanian	Palaran		0.119123
541	Kawasan Pertanian	Palaran		1.16665
542	Kawasan Pertanian	Palaran		0.884429
543	Kawasan Pertanian	Palaran		0.115203
544	Kawasan Pertanian	Palaran		0.003486
545	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000283
546	Kawasan Pertanian	Palaran		0.002457
547	Kawasan Pertanian	Palaran		2.168443
548	Kawasan Pertanian	Palaran		0.031556
549	Kawasan Pertanian	Palaran		1.011544
550	Kawasan Pertanian	Palaran		1.449899
551	Kawasan Pertanian	Palaran		0.097319
552	Kawasan Pertanian	Palaran		0.004275
553	Kawasan Pertanian	Palaran		0.233339
554	Kawasan Pertanian	Palaran		0.011359
555	Kawasan Pertanian	Palaran		0.005588
556	Kawasan Pertanian	Palaran		1.06451
557	Kawasan Pertanian	Palaran		1.117317
558	Kawasan Pertanian	Palaran		1.495055
559	Kawasan Pertanian	Palaran		1.331773
560	Kawasan Pertanian	Palaran		1.180626
561	Kawasan Pertanian	Palaran		0.726088
562	Kawasan Pertanian	Palaran		0.939838
563	Kawasan Pertanian	Palaran		4.427323
564	Kawasan Pertanian	Palaran		7.329797
565	Kawasan Pertanian	Palaran		0.01525
566	Kawasan Pertanian	Palaran		0.117306
567	Kawasan Pertanian	Palaran		0.007916
568	Kawasan Pertanian	Palaran		0.07767
569	Kawasan Pertanian	Palaran		2.465552
570	Kawasan Pertanian	Palaran		0.256445
571	Kawasan Pertanian	Palaran		0.738577
572	Kawasan Pertanian	Palaran		1.325478
573	Kawasan Pertanian	Palaran		3.760961
574	Kawasan Pertanian	Palaran		0.749211
575	Kawasan Pertanian	Palaran		0.791378
576	Kawasan Pertanian	Palaran		0.073589
577	Kawasan Pertanian	Palaran		0.175213
578	Kawasan Pertanian	Palaran		0.785423
579	Kawasan Pertanian	Palaran		0.62458
580	Kawasan Pertanian	Palaran		0.651905
581	Kawasan Pertanian	Palaran		0.968667
582	Kawasan Pertanian	Palaran		0.546943
583	Kawasan Pertanian	Palaran		0.627081
584	Kawasan Pertanian	Palaran		0.083771

585	Kawasan Pertanian	Palaran		0.005522
586	Kawasan Pertanian	Palaran		0.406859
587	Kawasan Pertanian	Palaran		0.007903
588	Kawasan Pertanian	Palaran		0.018027
589	Kawasan Pertanian	Palaran		0.038365
590	Kawasan Pertanian	Palaran		0.05505
591	Kawasan Pertanian	Palaran		0.001055
592	Kawasan Pertanian	Palaran		0.013983
593	Kawasan Pertanian	Palaran		0.033831
594	Kawasan Pertanian	Palaran		0.005199
595	Kawasan Pertanian	Palaran		0.081092
596	Kawasan Pertanian	Palaran		0.148221
597	Kawasan Pertanian	Palaran		0.008124
598	Kawasan Pertanian	Palaran		0.004001
599	Kawasan Pertanian	Palaran		0.033615
600	Kawasan Pertanian	Palaran		3.29933
601	Kawasan Pertanian	Palaran		1.69577
602	Kawasan Pertanian	Palaran		0.459154
603	Kawasan Pertanian	Palaran		0.002119
604	Kawasan Pertanian	Palaran		0.014786
605	Kawasan Pertanian	Palaran		0.425389
606	Kawasan Pertanian	Palaran		0.618162
607	Kawasan Pertanian	Palaran		1.941209
608	Kawasan Pertanian	Palaran		0.00004
609	Kawasan Pertanian	Palaran		0.008449
610	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000243
611	Kawasan Pertanian	Palaran		0.011979
612	Kawasan Pertanian	Palaran		0.053336
613	Kawasan Pertanian	Palaran		0.001791
614	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000273
615	Kawasan Pertanian	Palaran		0.037974
616	Kawasan Pertanian	Palaran		3.037593
617	Kawasan Pertanian	Palaran		0.063513
618	Kawasan Pertanian	Palaran		1.868256
619	Kawasan Pertanian	Palaran		0.166795
620	Kawasan Pertanian	Palaran		0.455691
621	Kawasan Pertanian	Palaran		0.039063
622	Kawasan Pertanian	Palaran		0.240995
623	Kawasan Pertanian	Palaran		0.002464
624	Kawasan Pertanian	Palaran		0.013939
625	Kawasan Pertanian	Palaran		0.058934
626	Kawasan Pertanian	Palaran		0.147971
627	Kawasan Pertanian	Palaran		1.390489
628	Kawasan Pertanian	Palaran		0.028326
629	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000283
630	Kawasan Pertanian	Palaran		0.014017
631	Kawasan Pertanian	Palaran		0.008764
632	Kawasan Pertanian	Palaran		0.00231
633	Kawasan Pertanian	Palaran		0.007653
634	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000037
635	Kawasan Pertanian	Palaran		0.020398
636	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000234
637	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000644
638	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000047
639	Kawasan Pertanian	Palaran		1.556143
640	Kawasan Pertanian	Palaran		0.140691
641	Kawasan Pertanian	Palaran		0.145722
642	Kawasan Pertanian	Palaran		1.149526
643	Kawasan Pertanian	Palaran		0.441298
644	Kawasan Pertanian	Palaran		1.714651
645	Kawasan Pertanian	Palaran		0.010339

646	Kawasan Pertanian	Palaran		0.001927
647	Kawasan Pertanian	Palaran		0.002435
648	Kawasan Pertanian	Palaran		0.036474
649	Kawasan Pertanian	Palaran		0.073747
650	Kawasan Pertanian	Palaran		0.565241
651	Kawasan Pertanian	Palaran		5.441507
652	Kawasan Pertanian	Palaran		0.00002
653	Kawasan Pertanian	Palaran		0.03346
654	Kawasan Pertanian	Palaran		1.372165
655	Kawasan Pertanian	Palaran		2.885365
656	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000417
657	Kawasan Pertanian	Palaran		4.802923
658	Kawasan Pertanian	Palaran		0.000679
659	Kawasan Pertanian	Palaran		0.183329
660	Kawasan Pertanian	Palaran		0.394788
661	Kawasan Pertanian	Palaran		0.452411
662	Kawasan Pertanian	Palaran		1.042019
663	Kawasan Pertanian	Palaran		0.519297
664	Kawasan Pertanian	Palaran		0.017497
665	Kawasan Pertanian	Palaran		0.029963
666	Kawasan Pertanian	Palaran		0.041669
667	Kawasan Pertanian	Palaran		0.069083
668	Kawasan Pertanian	Palaran		0.019986
669	Kawasan Pertanian	Palaran		0.01913
670	Kawasan Pertanian	Palaran		0.063608
671	Kawasan Pertanian	Palaran		0.088206
672	Kawasan Pertanian	Palaran		0.047579
673	Kawasan Pertanian	Palaran		0.023419
674	Kawasan Pertanian	Palaran		0.04087
675	Kawasan Pertanian	Palaran		0.203052
676	Kawasan Pertanian	Palaran		0.209486
677	Kawasan Pertanian	Palaran		0.139795
678	Kawasan Pertanian	Palaran		0.021724
679	Kawasan Pertanian	Palaran		0.742844
680	Kawasan Pertanian	Palaran		0.139827
681	Kawasan Pertanian	Palaran		0.119851

**LUAS LAHAN KECAMATAN PALARAN**

**258.038**

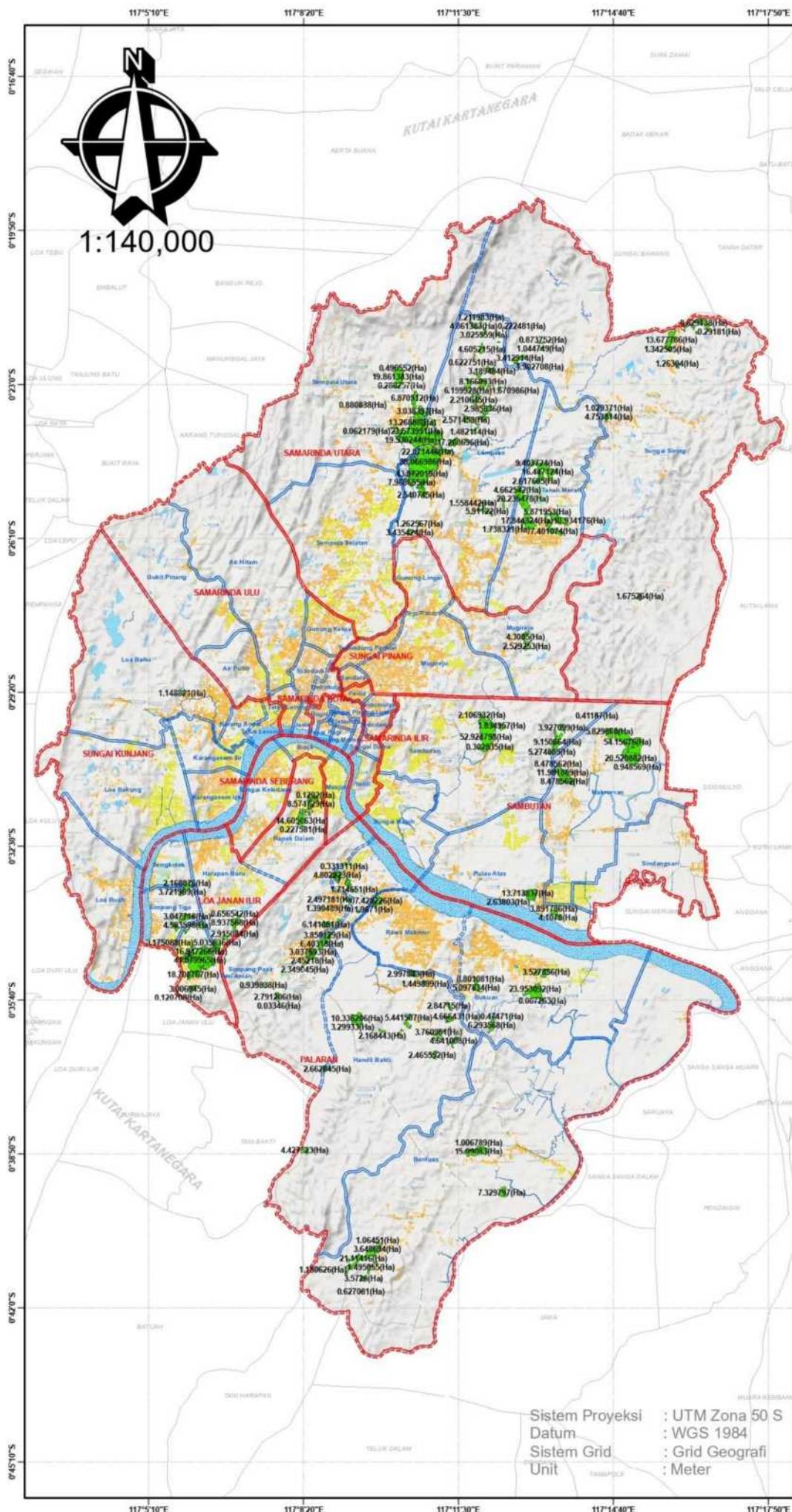
682	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.020033
683	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.518813
684	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.021427
685	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.039712
686	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.039933
687	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.067791
688	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.03336
689	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.1202
690	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.04468
691	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.015946
692	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.0293
693	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.026916
694	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.019629
695	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.023509
696	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.0225
697	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.044522
698	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.040421
699	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.024019
700	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.044241
701	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.011986
702	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.020956
703	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.078462
704	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.024296
705	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.020127

706	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.020128
707	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.064247
708	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.038686
709	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.019813
710	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.057123
711	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.004852
712	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.019407
713	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.023324
714	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.542557
715	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.001135
716	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.012402
717	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.092939
718	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.024833
719	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.190961
720	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.185307
721	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.019407
722	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.064875
723	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.02027
724	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.068405
725	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.064593
726	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.108312
727	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.02274
728	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.122502
729	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.014605
730	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.039995
731	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.061497
732	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.01973
733	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.019267
734	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.057837
735	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.033227
736	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.038902
737	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.023076
738	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.060349
739	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.020229
740	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.019832
741	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.028415
742	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.028288
743	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.019978
744	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.081246
745	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.0172
746	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.015309
747	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.007784
748	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.022247
749	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.085731
750	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.077811
751	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.060934
752	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.020247
753	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.039166
754	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.058582
755	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.039768
756	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.100409
757	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.018821
758	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.018183
759	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.017386
760	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.017009
761	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.017879
762	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.018476
763	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.07822
764	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.038108
765	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.03561
766	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.039182

767	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.060104
768	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.079937
769	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000957
770	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.011352
771	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.087036
772	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		2.915084
773	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.026061
774	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.09806
775	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		3.006945
776	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		1.289627
777	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		41.079965
778	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000539
779	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		2.705567
780	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		2.644048
781	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.002608
782	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		16.947266
783	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.048
784	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		4.583596
785	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.074087
786	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		8.937568
787	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		2.168876
788	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		3.721909
789	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		2.069318
790	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.52168
791	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.163548
792	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000325
793	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.046584
794	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.060541
795	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		14.605063
796	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.052907
797	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.227581
798	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.05212
799	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.002922
800	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.037769
801	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.028809
802	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.100376
803	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.895964
804	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		5.035636
805	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.206394
806	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.02959
807	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		18.708767
808	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.432663
809	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		3.175088
810	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		1.236162
811	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		4.594901
812	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.628765
813	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		3.805284
814	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.599643
815	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.127573
816	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000187
817	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.120708
818	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.006601
819	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.081251
820	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		2.36861
821	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.168756
822	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		1.147222
823	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.619133
824	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.015495
825	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.020646
826	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		1.350018
827	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.236875

828	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.020789
829	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.246841
830	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.108855
831	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.340596
832	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.139187
833	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		1.599969
834	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.041596
835	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		1.213826
836	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		3.047718
837	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.040407
838	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.549334
839	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.046487
840	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.347146
841	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.055278
842	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.205189
843	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.031377
844	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.179348
845	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.001273
846	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.004988
847	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.004944
848	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.476726
849	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.240581
850	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.011483
851	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000107
852	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.00667
853	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.05146
854	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.01612
855	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.030861
856	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.226916
857	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.151559
858	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.656542
859	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.006527
860	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.052788
861	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000157
862	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.29155
863	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.036221
864	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.22178
865	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		1.269527
866	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.06969
867	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		8.574729
868	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000003
869	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000046
870	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000102
871	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0
872	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.006971
873	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.006789
874	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000362
875	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.0003
876	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000084
877	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.0002
878	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000064
879	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000088
880	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.00004
881	Kawasan Pertanian	Loa Janan Ilir		0.000014
<b>LUAS LAHAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR</b>				<b>179.255</b>
<b>LUASAN TOTAL LAHAN SAWAH LP2B KOTA SAMARINDA</b>				<b>1230.880</b>

PETA LP2B



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PERTANIAN

Jl. Biola No. 01 Samarinda 75123  
Telp. (0541) 743114 Fax. (0541) 746827

PERATURAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021

## Peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Samarinda



Sistem Proyeksi : UTM Zona 50 S  
 Datum : WGS 1984  
 Sistem Grid : Grid Geografi  
 Unit : Meter  
 0 500.000 2.000 3.000 4.000  
 Meters

PEMBABIAN DAERAH ADMINISTRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Administrasi

BATAS KELURAHAN

BATAS KECAMATAN

PEMUKIMAN TERATUR

## **PEMUKIMAN TIDAK TERATUR**

## Jaringan Jalan

JALAN ALTERI

JALAN KOLEKTOR PRIMER

JALAN KOLEK

JALAN L

Perairan



Peraturan Daerah

 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN  
KOTA SAMARINDA (LP2B)  
**1.230,880 (HA)**

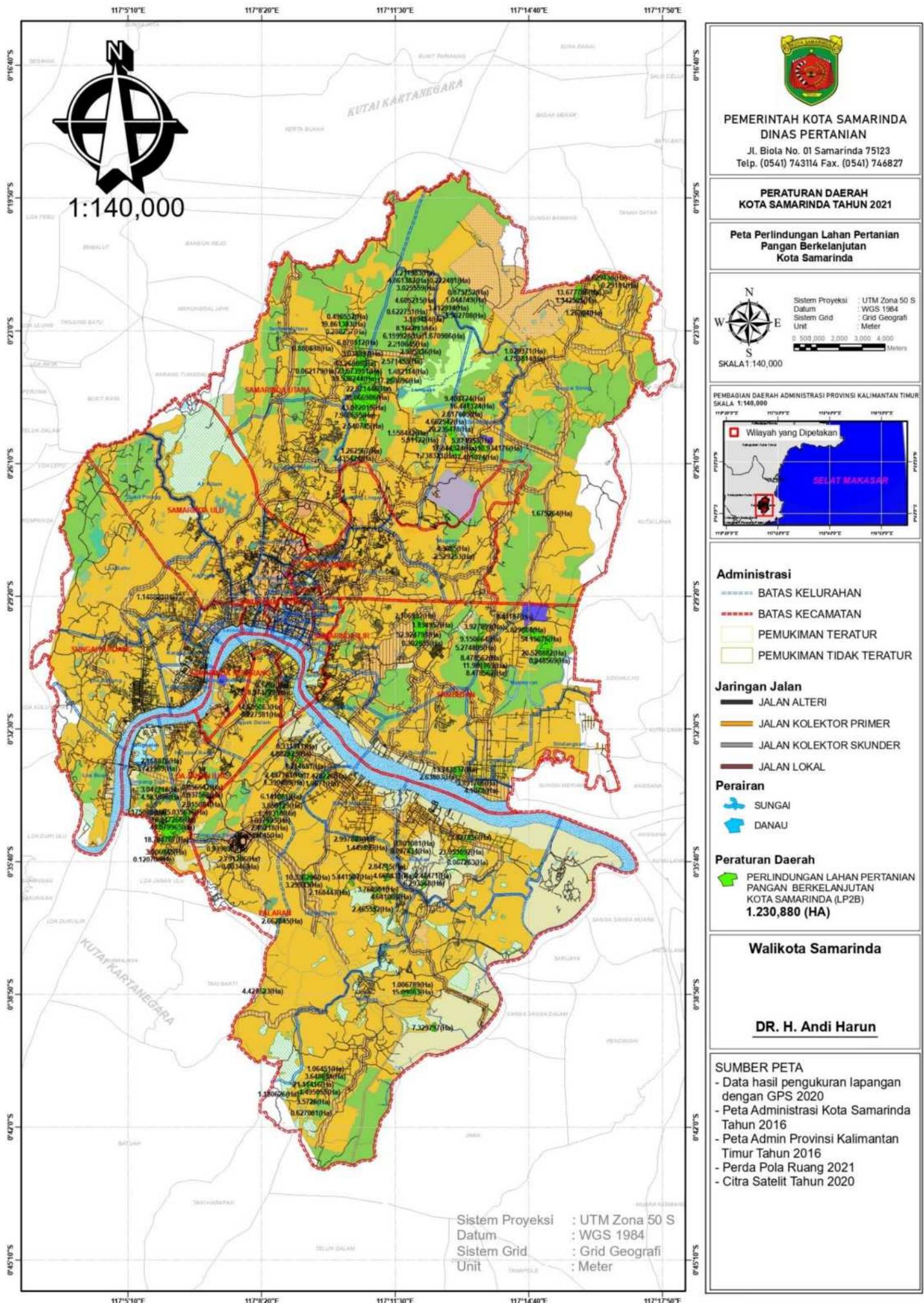
Walikota Samarinda

DR. H. Andi Harun

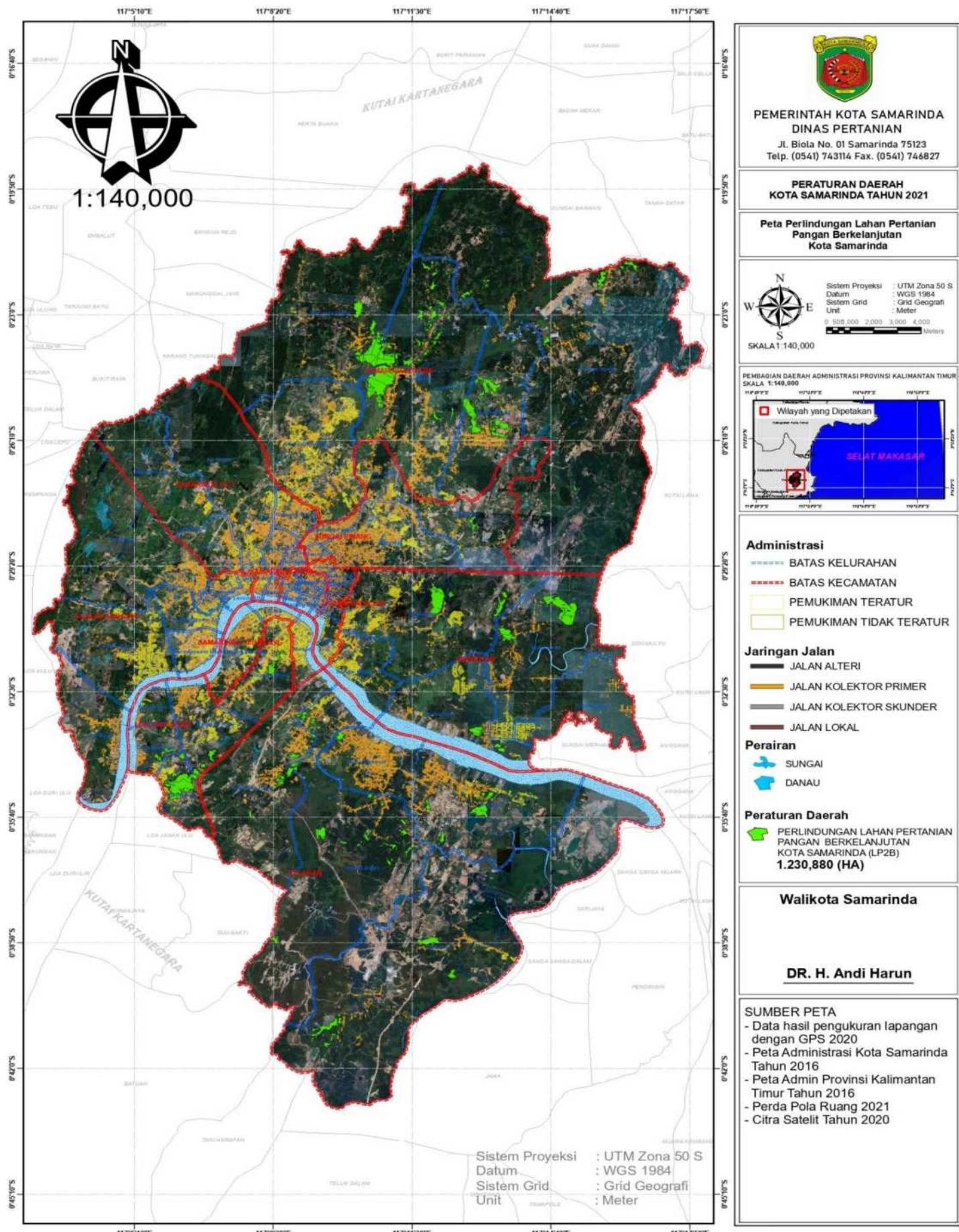
SUMBER PETA

- Data hasil pengukuran lapangan dengan GPS 2020
  - Peta Administrasi Kota Samarinda Tahun 2016
  - Peta Admin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
  - Perda Pola Ruang 2021
  - Citra Satelit Tahun 2020

## PETA KAWASAN LP2B



## CITRA SATELIT LP2B



WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 02 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
64.72/I/44/6/2021